

**ANALISIS YURIDIS FORMULASI PASAL 2 AYAT (1) DAN 3 TERKAIT
FRASA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA
PENGKREDITAN DESA (LPD)**

Oleh
Ni Kadek Srimasih Ristiyani, NIM 2114101160
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Pengkajian ini bermaksud untuk (1) mengkaji dan menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum lembaga pengkreditan desa dalam sistem hukum Indonesia. Untuk mengkaji dan menganalisis (2) penerapan frasa “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” Penelitian ini menelaah landasan yuridis penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Analisis dibangun melalui penalaran hukum normatif dengan menempatkan konsep hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai pijakan utama, yang didukung oleh penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa penentuan makna kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara dalam perkara LPD masih menghadapi perbedaan penafsiran, terutama terkait penetapan batas cakupan unsur tersebut. Persoalan tersebut berkelindan dengan belum adanya norma yang secara eksplisit mengategorikan kekayaan LPD sebagai komponen keuangan negara. Ketidakjelasan batas pengaturan tersebut berpotensi melahirkan perbedaan pemaknaan hukum dan ketidakpastian dalam menilai pertanggungjawaban pidana atas pengelolaan dana LPD. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan normatif untuk memperjelas cakupan penerapan ketentuan antikorupsi serta mengharmoniskan pengaturannya dengan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan LPD. Langkah ini penting agar penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada kepatuhan terhadap norma, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Formulasi Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Lembaga Pengkreditan Desa

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE FORMULATION OF ARTICLE 2 PARAGRAPHS (1) AND (3) REGARDING THE PHRASE " LOSS TO STATE FINANCES OR THE STATE ECONOMIC" IN CORRUPTION OFFENSES INVOLVING VILLAGE CREDIT INSTITUTIONS

By

Ni Kadek Srimasih Ristiyani, NIM 2114101160

Dapertment of Law and Citizenship

ABSTRACT

This study seeks to (1) examine and critically assess the regulatory framework governing Village Credit Institutions (Lembaga Perkreditan Desa or LPD) and their juridical standing within the Indonesian legal system, and (2) scrutinize the application of the phrase “state financial losses or losses to the state economy” in the context of corruption law enforcement. To this end, the inquiry undertakes a doctrinal analysis of Articles 2(1) and 3 of the Indonesian Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, particularly insofar as these provisions pertain to the administration and financial management of LPDs. The research adopts a normative legal methodology, integrating a conceptual approach with a statutory approach. Its analytical foundation is derived from a comprehensive literature review encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the interpretation of the constituent element concerning losses to state finances or the state economy remains susceptible to divergent constructions when applied to cases involving LPDs. This interpretive ambiguity stems, in part, from the absence of an unequivocal statutory provision expressly classifying LPD assets as part of state finances. Such regulatory indeterminacy may engender inconsistent legal interpretations and undermine legal certainty in determining whether the anti-corruption provisions apply to the management of LPD funds. Accordingly, a more coherent normative framework is imperative, requiring both a methodologically rigorous interpretation of the relevant legal provisions and greater regulatory harmonisation between anti-corruption legislation and the legal instruments governing LPDs. These measures are expected to foster a more principled foundation for law enforcement, one that accommodates the interrelated imperatives of legal certainty, justice, and utility.

Keywords : Legal formulation, corruption crimes, state financial loss, Village Credit Institutions (LPD)